

PRAKTIK AKUNTANSI BETAWIAN DALAM PERSPEKTIF KUASA DAN PENGETAHUAN

I Gusti Ayu Nyoman Budiasih
Ni Made Adi Erawati
I Made Sadha Suardikha

Universitas Udayana, Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kabupaten Badung 803611
surel: iganbudiasih17@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9001>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 1
Halaman 1-19
Malang, April 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
29 Juni 2017
Tanggal Revisi:
14 April 2018
Tanggal Diterima:
30 April 2018

Abstrak: Praktik Akuntansi Betawian dalam Perspektif Kuasa dan Pengetahuan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan praktik akuntansi Betawian pada masa kekuasaan Belanda. Metode yang digunakan adalah perspektif Foucauldian. Artikel ini menemukan bahwa perspektif kuasa kapitalis menghasilkan pengaruh besar terhadap pemungutan pajak yang dilakukan pada masyarakat Betawi. Kuasa dari kolonialisme Belanda merupakan mekanisme yang dapat menciptakan pengetahuan praktik akuntansi yaitu dalam hal pembuatan aturan pemungutan pajak maupun denda kepada rakyat lokal. Hal ini digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dalam jangka waktu panjang.

Abstract: The Betawian Accounting Practice in Power and Knowledge Perspective. This article aims to identify and explain the Betawian accounting practices during the Dutch colonialism period. The method used is Foucauldian perspective. This article finds that the perspective of capitalist power produces a major influence on tax collection conducted on Betawi society. Power of Dutch colonialism is a mechanism that can create knowledge (accounting practices) that is in terms of making the rules of tax collection and fines to the local people. It is used as a tool to perpetuate power in the long term.

Kata kunci: akuntansi, betawi, kolonialisme

Akuntansi sebenarnya telah terjadi dan dipraktikkan di masa lalu dengan konteks sosial pada masa itu. Akuntansi dapat memberikan suatu makna berarti apabila tidak terlepas dari pembentukan akuntansi di masa lampau ataupun realitas organisasi dan sosialnya (Walker, 2016). Praktik-praktik akuntansi yang terjadi di suatu negara pada masa lalu dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungannya (Budiasih, 2016) saat itu kondisi juga ikut memengaruhi bagaimana perkembangan akuntansi di negara tersebut. Akuntansi mencakup kehidupan sosial dari lingkup terkecil yakni individu, perusahaan atau organisasi, sampai dengan lingkup terbesar yaitu antarnegara (Gebreiter & Ferry, 2016). Selain itu, waktu ternyata juga merupakan suatu elemen penting dalam akuntansi karena akuntansi mencakup

kehidupan sosial masyarakatnya yang terjadi dari masa lalu, masa kini, hingga masa datang (Parker, 2011). Makna dimensi waktu dalam kehidupan menjadi faktor yang menentukan ketika memahami peristiwa sejarah. Sebagai peristiwa masa lalu sejarah mempunyai dimensi temporal yang sangat penting, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apabila masa lalu dapat diketahui maknanya maka dapat dikatakan bahwa sejarah mampu menjadi guru terbaik guna memahami masa sekarang dan memproyeksikan kehidupan di masa yang akan datang. Jadi, praktik akuntansi ada dalam kehidupan sosial dari yang terkecil hingga terbesar dan dimulai dari masa lalu, saat ini, dan masa mendatang.

Akuntansi merupakan suatu ilmu yang praktiknya dibentuk berdasarkan interaksi

si sosial yang begitu kompleks, selanjutnya disebut sebagai ilmu sosial. Akuntansi sebagai suatu ilmu sosial, praktiknya tidak bebas dari nilai, tetapi sebaliknya sangat sarat dan kental dengan nilai (Triuwono, 2016). Nilai-nilai yang membentuk praktik akuntansi sangat ditentukan oleh faktor-faktor seperti kultur masyarakat, sistem ekonomi, politik, dan sosial (Budiasih, 2012) di mana akuntansi tersebut dipraktikkan. Jadi, akuntansi yang digunakan sebagai bahasa bisnis seperti saat ini tidak ada dengan begitu saja. Namun, selalu berkaitan dengan fenomena sosial yang ada di lingkungan tempat akuntansi tersebut dipraktikkan (Budiasih, 2016). Praktik akuntansi dibentuk oleh lingkungan sosial dan sekaligus membentuk lingkungan sosial itu sendiri (Budiasih, 2016). Akuntansi sebagai suatu ilmu sosial, praktiknya juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi dan kapitalisme (Badua & Racca, 2017). Hal ini mengakibatkan hubungan yang sangat erat antara praktik akuntansi dan kapitalisme yang akhirnya dapat menimbulkan adanya perkembangan praktik akuntansi yang berdampingan dengan kapitalisme itu sendiri.

Kapitalisme akan dapat mengubah perilaku dalam hubungannya dengan praktik akuntansi di lingkungannya (Robertson & Funnell, 2012) disebabkan karena akuntansi itu merupakan ilmu sosial yang praktiknya selalu berhubungan dengan lingkungannya. Apabila lingkungan sosial yang membentuk akuntansi tersebut adalah lingkungan kapitalisme, maka perkembangan praktik akuntansi sebagai suatu ilmu sosial juga akan berlandaskan kapitalisme. Praktik akuntansi dalam lingkungan kapitalisme juga pada akhirnya akan tidak berdaya dan terperangkap dalam gelombang arus kapitalisme itu sendiri (Badua & Racca, 2017). Perkembangan praktik akuntansi dalam lingkungan sosial (Budiasih, 2016) yang sangat dominan budaya kapitalismenya akan mengakibatkan perilaku individu-individu yang termasuk di dalamnya juga akhirnya ikut berperilaku kapitalis. Demikian juga halnya dengan praktik akuntansi yang terjadi dalam masyarakat Betawi di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda sebagai suatu sistem kapitalis pada masa itu.

Kata Betawi sebenarnya berasal dari kata Batavia yaitu nama Jakarta lama yang dulu diberikan oleh kolonialisme Belanda. Betawi digunakan untuk menyatakan

suku asli yang menghuni daerah Jakarta dan menggunakan bahasa dan kebudayaan Melayu (Suswandari, 2017). Suku Betawi sebenarnya bukanlah suku asli melainkan berasal dari percampuran antar berbagai suku bangsa yang lebih dulu ada di Batavia (Knight, 2014). Keturunan campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia (Steyaert, 2012) merupakan pembentuk suku Betawi. Mengenai asal usul etnis Betawi, beberapa ahli mengklaim bahwa mereka terlahir dari perkawinan silang dengan kelompok lain yang telah ada di Jakarta saat diberi nama Batavia. Di antara kelompok etnis termasuk orang Ambon, Bali, Banda, Bugis, Bima, Buton, Flores, Jawa, Melayu, Sunda, dan Sumbawa. Beberapa catatan sejarah di Jakarta menyatakan bahwa etnis Betawi berasal dari perkawinan antaretnis yang datang ke Batavia karena kepentingan Belanda. Jadi, suku Betawi sebenarnya merupakan suku pendatang baru di Batavia, perpaduan dari berbagai suku lain yang sudah lebih dulu hidup di Batavia yang berasal dari beberapa pulau lain di semenanjung Indonesia, seperti orang Jawa, Bali, Sunda, Tionghua, dan Arab (Knight, 2014; Knörr, 2009). Berbagai etnis sebagai pembentuk suku Betawi pada masa itu menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Kolonial Belanda saat itu. Hal tersebut disebabkan oleh kemajuan daerah Batavia yang cukup pesat khususnya dalam bidang perdagangan sehingga praktik akuntansi masyarakat Betawi pun ikut menjadi pusat perhatian kaum kapitalis sebagai penguasa pada masa itu yaitu koloni Belanda. Praktik akuntansi masyarakat Betawi (selanjutnya dalam makalah ini disebut dengan akuntansi Betawian) pada masa kolonialisme Belanda memiliki suatu keunikan karena merupakan praktik akuntansi yang berhubungan dengan lingkungan yang berasal dari campuran berbagai suku dan etnis saat itu yang perlu untuk diketahui. Di samping itu disebabkan juga pada masa itu Betawi menjadi pusat perhatian kaum kapitalis dengan kemajuan pesatnya dalam bidang perdagangan yang dialami masyarakat tersebut. Jadi berdasarkan hal itulah pembuatan artikel ini bertujuan ingin mengetahui dan menjelaskan lebih dalam secara konseptual teoretis tentang hubungan antara pengetahuan praktik akuntansi Betawian pada masa kekuasaan kapitalis kolonialisme Belanda dipandang dari perspektif “kuasa-pengeta-

huan” Foucauldian.

Riset-riset empiris mengenai praktik akuntansi di masa lalu atau sejarah praktik akuntansi telah dilakukan baik di Indonesia maupun internasional. Penelitian mengenai sejarah akuntansi Indonesia pada masa kejayaan Kerajaan Singosari (Lutfillah, 2014; Lutfillah & Sukoharsono, 2013) menemukan bahwa akuntansi pada masa kejayaan kerajaan Singosari dapat dilihat dalam hal kuasa Raja Ken Arok dalam menentukan pengetahuan atau aturan seperti aturan pembayaran pajak untuk masyarakatnya. Selain itu, sejarah akuntansi Indonesia dalam hal sosial, politik, dan ekonomi dikaji dalam penelitiannya (Kusdewanti, Setiawan, Mulawarman, & Kamayanti, 2014). Penelitian tentang konstruksi praktik-praktik akuntansi pada masa pemerintahan Raja Udayana di Bali (Budiasih, 2012) juga melengkapi riset sejarah akuntansi dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakatnya. Sejarah akuntansi di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda pada abad ke-17 (Hing, 2017) ikut melengkapi riset sejarah akuntansi di Indonesia. Sementara itu, riset-riset sejarah akuntansi di dunia juga telah banyak dilakukan seperti Edwards (2011), Haka (2016), Sangster (2012), Hollingsworth (2012), Yamey (2012), Patton & Hutchison (2013), dan Thompson (2013). Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai sejarah akuntansi baik di Indonesia maupun internasional, dipandang masih terdapat riset *gap* dalam hal lokasi dan objek kajian sejarah akuntansi. Artikel ini mencoba untuk lebih mendalami mengenai sejarah praktik akuntansi Betawian pada masa kapitalisme kolonialisme dipandang dari perspektif Foucauldian.

METODE

Penggunaan konsep filosofis Foucauldian dalam studi sejarah akuntansi menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Michael Foucault (selanjutnya dalam makalah ini disebut Foucault saja) yaitu konsep kuasa-pengetahuan (*Power-knowledge*). Foucault beranggapan bahwa sejarah dipahami bukan sebagai sesuatu yang berkesinambungan tetapi sebagai suatu diskontinuitas. Foucault memahami sejarah tidak sebagai garis sambung yang melanjutkan garis sebelumnya atau yang menghubungkan satu periode dengan periode lainnya, melainkan sebuah perjalanan yang terjadi secara diskontinuitas (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015). Diskontinuitas dinilai

sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di mana sebelumnya telah terjadi terlebih dahulu sebuah proses distribusi pengetahuan baru. Artinya, dalam setiap perubahan jaman terdapat juga perubahan tema kejadian sebagai landasannya. Perubahan-perubahan tema tersebut dalam konsep diskontinuitas, tidaklah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi terjadi sesuai dengan kejadiannya. Pandangan sejarah berdasarkan pemikiran Foucault termasuk dalam sejarah akuntansi tersebut.

Konsep utama Foucault dalam menjelaskan tentang diskontinuitas sejarah akuntansi adalah melalui kuasa-pengetahuan (*power-knowledge*). Hal utama yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tentang hubungan antara kuasa dan ilmu pengetahuan. Jadi, dipandang perlu kiranya untuk memahami tentang hubungan yang terjalin antara kuasa dan pengetahuan yang menjadi substansi pemikiran Foucault tersebut. Kuasa dan ilmu pengetahuan menurut Foucault dianggap memiliki hubungan yang sangat erat.

Bagi Foucault sejarah merupakan sebuah ilmu arkeologi. Sejarah sebagai arkeologi ini dapat dipahami di dalam bukunya tentang Sejarah Kegilaan (Ball, 2015; Ladva & Andrew, 2014). Foucault memahami arkeologi tersebut bukanlah sebagai *arche* melainkan dipandang sebagai *archive*, yaitu bukan asal muasal sesuatu tetapi sebagai dokumen sejarah. Menurutnya, arkeologi menguji arsip sejarah sebagai sistem yang memapankan pernyataan-pernyataan sebagai peristiwa atau sebagai benda. Sejarah dalam wacana Foucault dibatasi pada sejarah pengetahuan. Selanjutnya, dalam menjelaskan tentang kebenaran suatu pengetahuan, Foucault menggunakan metodologi arkeologi (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015). Karya awal Foucault untuk menjelaskan suatu kebenaran yaitu dengan cara mengupas tentang sebuah metodologi yang dinamakan dengan arkeologi pengetahuan. Terbitnya buku *The Archeology of Knowledge* tahun 1969 menyatakan bahwa seluruh buku-buku yang ditulisnya berfokus pada penelitian arkeologi dan melakukan penyelidikan terhadap fenomena sejarah (Campbell & Kelly; Lemke, 2015).

Pendekatan arkeologi dititikberatkan pada objek artefak, sesuatu yang tanpa konteks, serta artikel-artikel serta arsip-arsip yang tersisa pada masa lalu (Budiasih, 2012). Penjelasan yang lain menyatakan

bahwa arsip adalah seperangkat diskursus yang secara aktual tergambarkan. Melalui metode arkeologi Foucault berusaha menggali masing-masing tema dari setiap periode. Tema tersebut sekaligus digunakan sebagai pisau analisis terhadap sistem pengetahuan yang diproduksi oleh berbagai wacana praktis pada masanya (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015). Menurut Foucault, apa pun yang membentuk pengetahuan pada masanya banyak ditentukan oleh wacana praktis tersebut. Foucault menyadari bahwa perjalanan sejarah pengetahuan bukanlah suatu perjalanan garis sambung yang melanjutkan garis sebelumnya. Kondisi ini menjadi inspirasi baginya untuk merumuskan konsep diskontinuitas sejarah (Flew, 2015; Suyono, 2001). Jika arkeologi berada di gerbang depan dalam proses ilmiah, diskontinuitas sejarah berada di garis akhir proses itu. Atau dapat dikatakan bahwa diskontinuitas merupakan simpulan studi yang berangkat melalui pendekatan arkeologi.

Bagaimana memahami kondisi pengetahuan yang ada pada masyarakat, haruslah juga dilihat bagaimana pola penyebaran pengetahuan yang ada. Proses distribusi pengetahuan akan mengakibatkan sebuah rezim kebenaran atas pengetahuan tersebut yang akan menentukan apa yang dianggap benar dan tidak benar dalam sejarah. Ciri yang menonjol dari arkeologi salah satunya adalah penolakan terhadap kehadiran peneliti dalam menginterpretasikan sebuah teks. Dalam hal ini Foucault berpendapat bahwa peniadaan peran peneliti ini bermanfaat untuk dapat mencari modus eksistensi dari sebuah teks yang nantinya berpengaruh pada pola penyebaran formasi diskursif (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Durepos & Mills, 2017). Hal ini disebabkan oleh pemahaman eksistensi teks pada tiap generasi berbeda sehingga membuat peneliti tidak bisa mengetahuinya. Cara untuk memperoleh keberadaan suatu teks tidak cukup diteliti dengan melihat kehadiran pengarang saja tetapi juga harus meneliti teks-teks lain di luar lingkaran peneliti. Pada akhirnya Foucault merasa bahwa dalam arkeologi perlu menghilangkan fokus dan prasangka antropologis. Pembahasan tentang manusia dapat menyesatkan dan mendistorsi pemikiran kita karena individu-individu tersebut adalah bentukan dari epistemik (Campbell & Kelly, 2013; Suyono, 2001).

Arkeologi pengetahuan merupakan karya awal Foucault. Pandangan Foucault

tentang arkeologi memiliki perbedaan makna dengan ilmu purbakala atau ilmu geologi. Atau juga bukan ilmu genealogi yang mempelajari mengenai asal mula dan sebab akibatnya. Namun, arkeologi pengetahuan menurut Foucault digunakan dalam menguji arsip yang berawal dari suatu sistem pemikiran (yang disebut episteme) di setiap masa yang menjurus pada praktik ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Usaha untuk menggali atau mengeksplorasi episteme yang menentukan suatu masa tertentu menurut Foucault disebut sebagai analisis berdasarkan arkeologi. Jarak waktu antara masa lampau dan masa sekarang sangatlah jauh sehingga kemungkinan akan menyebabkan retakan-retakan atau kejadian-kejadian yang ada ditutupi oleh peristiwa lainnya. Kejadian-kejadian inilah menurut Foucault disebut sebagai diskontinuitas dalam sejarah. Foucault (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015) memahami sejarah tidak sebagai garis sambung yang menghubungkan satu periode dengan periode lainnya melainkan sebuah perjalanan yang terjadi secara diskontinuitas.

Pemikiran Foucault setelah arkeologi pengetahuan adalah genealogi yang ditandai dengan lahirnya karya Foucault berjudul "Nietzsche, Genealogy History". Metode genealogi ini mengupas mengenai bagaimana tubuh manusia meregulasi diri dan mengontrol diri di bawah kendali kekuasaan yang dipresentasikan oleh pengetahuan yang diyakini kebenarannya (Armstrong, 2015; Bigoni & Funnell, 2015). Produk sejarah dari pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya tidak lepas dari pengetahuan sebuah produk pemikiran seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, genealogi berusaha untuk mengungkap keanekaragaman faktor di balik suatu peristiwa dan kerapuhan bentuk-bentuk sejarah karena adanya diskontinuitas sejarah tersebut. Jadi, genealogi menurut Foucault adalah berusaha menggambarkan bagaimana relasi-relasi kekuasaan dan pengetahuan berjalan untuk menguasai, mengontrol, dan menundukkan tubuh manusia.

Metode genealogi adalah metode yang menolak cara tafsir historiografi yang seolah-olah mampu melihat rentetan kejadian secara objektif belaka (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Helden & Uddin, 2016). Apabila sejarah mau merunut asal-usul sesuatu hal secara objektif begitu

saja, genealogi juga merunut motivasi-motivasi di balik munculnya hal-hal tersebut. Genealogi juga berbeda dari pendekatan hermeneutik, agama, ataupun fenomenologi yang beranggapan bahwa seolah-olah sesuatu hal itu dapat dirunut hingga pada asal-usulnya yang terakhir, kebenaran yang mutlak.

Kuasa sebagai suatu strategi dan mekanisme mengandung beberapa metodologis kekuasaan yang menjadi fokus perhatian Foucault (Ladva & Andrew, 2014; Nikidehaghani & Hui, 2017). Pertama, peran hukum dan aturan-aturan. Kedua, tujuan kekuasaan, di mana tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan adalah membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar menjadi pribadi yang produktif. Ketiga, kekuasaan itu tidak dilokalisasi tetapi terdapat di mana-mana. Kesadaran akan kekuatan suatu negara dan masyarakat tidak dibatasi hanya dari para pemimpin tetapi atas kerja sama setiap pribadi dan lembaga yang memiliki orientasi produktif. Keempat, kekuasaan yang mengarah ke atas, yaitu hasil dari proses komunikasi kekuasaan bersama akan menghasilkan kekuasaan bersama. Kelima, kombinasi antara kekuasaan dan Ideologi, yaitu setiap anggota dalam masyarakat kurang lebih memiliki impian yang sama yaitu adanya pengakuan setiap orang yang terarah pada kesejahteraan bersama. Harapan ini harus berjalan bersama dengan kekuasaan bersama.

Melalui penerapan analisis historis, genealogi sebagai salah satu teknik analisis meneliti asumsi-asumsi atau premis yang dibangun para pelaku (ilmuwan) serta objek yang menjadi fokus perhatian genealogi (Flew, 2015; Suyono, 2001). Akan tetapi dengan genealogi, Foucault tidak sedang memberikan contoh konkret bagaimana seorang ilmuwan bekerja secara ilmiah. Fokus sentral genealogi adalah pada hubungan timbal balik antara kuasa dengan pengetahuan (Helden & Uddin, 2016).

Genealogi Foucault berusaha memperlihatkan bagaimana hubungan kuasa dan pengetahuan berjalan untuk menguasai, mengontrol, serta menundukkan tubuh manusia hingga seperti yang terjadi sekarang (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Suyono, 2001). Foucault berusaha mendudukan antara kuasa dan diskursus (Kumarasinghe, 2011). Foucault ingin mengupas tentang bagaimana tubuh manusia

meregulasi diri dan mengontrol diri di bawah kendali kuasa yang direpresentasikan oleh pengetahuan yang telah dipercaya kebenarannya. Foucault menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dikejar untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kuasa. Genealogi tidak hanya menghubungkan sistem kebenaran dan strategi kuasa, tapi menunjukkan bagaimana mengonsepsikan pemahaman bagi kuasa dalam cara menambah suatu dimensi baru dalam penyelidikan relasi-relasi sosial.

Berdasarkan pemaparan tersebut tentang pemikiran pengetahuan dan kuasa menurut Foucault, dapat dikatakan bahwa pemikiran Foucault yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kuasa yang tersembunyi di balik pengetahuan (Bisman, 2011; Carnegie, 2014). Analisis diskursus terhadap kuasa dan pengetahuan memberikan suatu pemahaman bahwa peranan pengetahuan telah mampu melanggengkan dominasi terhadap kaum marjinal. Jadi hubungan antara bentuk kuasa dan pengetahuan telah menciptakan suatu bentuk dominasi baru.

Kondisi inilah akhirnya membuat sejarah itu sebagai tema-tema yang harus dipandang secara kritis dan tidak dapat lepas baik dari metode arkeologi maupun genealogi. Kebenaran atas pengetahuan dapat diteliti berdasarkan arkeologinya atau sering disebut arkeologi pengetahuan, sedangkan kuasa ada di mana-mana dan pada siapa saja sehingga dipahami berdasarkan genealoginya, yang disebut sebagai genealogi kuasa (Helden & Uddin, 2016; Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Suyono, 2001). Foucault memahami sejarah tidak sebagai garis sambung yang menghubungkan satu periode dengan periode lainnya melainkan sebuah perjalanan yang terjadi secara diskontinuitas (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015). Dengan menerapkan analisis historis, genealogi sebagai salah satu teknik analisis meneliti asumsi-asumsi atau premis yang dibangun para ilmuwan serta objek yang menjadi fokus perhatian genealogi. Fokus sentral genealogi adalah pada hubungan timbal balik antara kuasa dan pengetahuan.

Kuasa dan pengetahuan Foucault dijalankan melalui suatu prosedur disiplin yang beroperasi secara berbeda pada individu. Prosedur inilah merupakan teknik khusus kuasa yang memandang individu sebagai suatu objek dan juga sebagai instrumen bagi

pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang dan kebijakan yang dibuat di suatu daerah (Batavia) serta berbagai macam strategi dalam kekuasaan kapitalisme koloni dapat dikategorikan sebagai prosedur disiplin dalam tataran fisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Betawi dalam kuasa kapitalis kolonialisme. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi (Nikidehaghani & Hui, 2017). Namun, bagi Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara atau sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan baginya ada di mana-mana karena kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi di sana pasti ada kekuasaan. Di sinilah letak kekhasan yang diungkapkan Foucault mengenai kekuasaan. Dia tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi mengungkapkan bagaimana kuasa itu berfungsi pada bidang tertentu. Hal ini misalnya bagaimana warga negara secara individual sangat patuh dan taat pada konstitusi ataupun pada hukum negaranya (Ball, 2015). Kuasa yang dimaksudkan adalah sama dengan kekuasaan terhadap suatu hal tertentu.

Foucault tidak mendefinisikan secara konseptual tentang apa itu kekuasaan tetapi lebih menekankan bagaimana kekuasaan itu dipraktikkan, diterima, dan dipandang sebagai pengetahuan/kebenaran dan berfungsi dalam berbagai bidang kehidupan. Kekuasaan tidak hanya menjadi milik pemimpin atau entitas yang berpengaruh dalam masyarakat tetapi kekuasaan berangkat dari kekuatan dan sumbangan pemikiran setiap subjek. Foucault memperlihatkan cara berbeda dalam menggambarkan tentang kuasa. Cara Foucault memahami kuasa sangatlah murni. Menurutnya kuasa tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lainnya (Edgley, 2010).

Foucault meneliti kuasa lebih pada individu atau subjek dalam lingkup yang paling kecil. Hal ini disebabkan kuasa itu menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan hubungan sosial (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015). Kuasa itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum tertentu (Catchpole & Smyth, 2016; Kornberger, Pflueger,

& Mouritsen, 2015; Modell, 2017) dalam hubungan dengan pengetahuan ataupun lembaga. Namun, menurut Foucault kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara dan sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan yang terjadi secara mutlak dan tidak bergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di dalamnya terdapat sistem, aturan, susunan, dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan yang menentukan susunan, aturan, dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi. Bagi Foucault kekuasaan lebih menggambarkan pada mekanisme dan strategi dalam mengatur kehidupan bersama di masyarakat.

Genealogi kekuasaan bagi Foucault tidak seperti metode lainnya dalam memandang kekuasaan yang dimiliki oleh subjek yang dominan. Hal tersebut disebabkan bagi Foucault kekuasaan itu berada dalam diri setiap orang sebagai strategi yang memberikan efek kekuasaan di mana pun berada. Penggunaan metode genealogi Foucault diharapkan nantinya dapat berfungsi untuk mencari sisi-sisi terdalam kekuasaan kapitalis kolonialisme Belanda di Batavia.

Kuasa menurut Foucault tidak hanya menjadi milik pemimpin yang berpengaruh dalam masyarakat tetapi kuasa berawal dari kekuatan dan sumbangan pemikiran setiap individu. Kuasa lebih digambarkan sebagai suatu mekanisme dan strategi dalam mengatur kehidupan. Foucault beranggapan bahwa setiap hubungan sosial selalu merupakan hubungan kuasa dan kuasa itu ada dalam setiap hubungan sosial. Kuasa yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam pandangan Foucault bersifat produktif dan tidak kelihatan karena ada di mana-mana, menyebar, dan menyusup dalam setiap aspek kehidupan, serta terserap dalam pengetahuan dan praktik sosial yang akhirnya menciptakan suatu rezim kebenaran (Helden & Uddin, 2016; Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015). Berdasarkan sifat yang demikian, keberlangsungan kuasa itu seolah-olah tidak disadari lagi dan dengan rela melakukan apa yang dikehendaki oleh kuasa tanpa menyadari bahwa mereka se-

dang dikuasai.

Kuasa tersebut beroperasi secara tidak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat. Setiap masyarakat mengenal strategi kuasa yang menyangkut kebenaran. Kuasa hanya menghasilkan pembatasan dan larangan. Hal ini diungkapkan dalam hukum dan wacana yuridis yang hanya bersifat membatasi. Hukuman bagi ketidaktaatan selalu juga menyertai karena kuasa tidak lain adalah berperan mendominasi. Bagi Foucault yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kuasa selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu berbasis kekuasaan dan tidak mungkin suatu kekuasaan tidak ditopang dengan suatu wacana kebenaran atau pengetahuan (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015). Hal tersebut disebabkan dengan pengetahuannya sendiri manusia merupakan makhluk yang dibatasi oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu karena rasionalitas dan kebenaran selalu berubah sepanjang sejarah. Pengetahuan memiliki kriteria keilmiahannya seolah-olah mandiri terhadap subjek tertentu. Padahal, klaim ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari strategi kuasa. Foucault mendefinisikan strategi kuasa melekat pada kehendak untuk mengetahui. Melalui sebuah wacana kehendak untuk mengetahui sesuatu terumus dalam pengetahuan. Wacana bukan muncul begitu saja melainkan diproduksi oleh jaman-masing-masing.

Foucault berpendapat bahwa kehendak untuk mengetahui kebenaran sama besarnya dengan kehendak untuk berkuasa. Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Diskursus adalah satuan peristiwa atau satuan benda yang berfungsi strategis untuk menguasai kehidupan sosial dan budaya. Diskursus berubah dan bertransformasi di dalam sejarah karena bergesekan dengan diskursus yang lain. Diskursus menurut Foucault bukan diskursus yang apriori sebagaimana dalam linguistik melainkan diskursus yang fungsional dan ada dalam dunia praktis. Diskursus ilmu pengetahuan yang ingin menemukan apa yang dianggap benar dan yang salah pada dasarnya dimotori oleh kehendak untuk berkuasa (Ball, 2015). Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang dianggap benar dan meniadakan apa yang dipandang salah. Berdasarkan ungkapan tersebut akhirnya menjadi

jelas bahwa kehendak untuk suatu kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa (Nikidehaghani & Hui, 2017). Pengetahuan itu tidaklah mungkin sesuatu yang bersifat netral dan murni. Artinya, akan selalu terjadi korelasi antarkeduanya, yaitu terjadi korelasi pengetahuan yang mengandung kuasa demikian juga halnya kuasa mengandung suatu pengetahuan.

Sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Foucault adalah menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari mekanisme kekuasaan itu. Dari kesadaran ini akan lahir kesanggupan untuk menggunakan kekuasaan secara baik, artinya demi kepentingan orang lain. Keterarahan pada orang lain hanya lahir dari kesadaran akan tempat diri sendiri dalam konstelasi kekuasaan. Yang menjadi masalah dalam kehidupan adalah bahwa banyak orang tidak menyadari perannya dalam peta kekuasaan. Apabila sadar akan hal ini, orang tersebut akan menerima dan menghargai keberagaman peran yang ada dalam relasi kekuasaan. Dari ketidaksadaran ini akan lahir berbagai tindakan dan sistem yang menindas dan menyeragamkan, di mana Foucault menjelaskannya dalam relasi kekuasaan antara hasrat kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengetahuan.

Nilai-nilai kuasa genealogi Foucault dapat menguak keberadaan akuntansi pada masa kapitalis kolonialisme Belanda di Batavia. Nilai-nilai kuasa berdasarkan pemikiran Foucault ini secara garis besar bersifat kuasa fisik yang diwujudkan dalam praktik politik pengaturan suatu sistem pemerintahan. Demikian halnya nilai-nilai kuasa menurut Foucault diterapkan dalam sistem pemerintahan yang terjadi pada masa kekuasaan Kolonialisme Belanda di Batavia. Sebuah konsep yang bisa jadi didesain oleh penguasa kolonialisme Belanda di Batavia untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kota Batavia didirikan oleh Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1619 sebagai markas besar bagi kapal-kapal VOC yang melakukan kegiatan perdagangan di Asia. Masalah sumber daya manusia merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Batavia pada masa awal berdirinya. Meski dapat disebut sebagai kota koloni Belanda, jumlah penduduk asli Eropa selamanya merupakan minoritas di Batavia. Rencana Jan Pieterszoon Coen untuk menjadikan Batavia sebagai kota koloni yang didominasi oleh imigran dari Eropa ditolak oleh 17 direktur VOC yang bermarkas di Belanda (Knight,

2014). Mereka keberatan karena golongan penduduk Eropa yang dapat berdagang dengan leluasa akan menjadi pesaing dan menimbulkan masalah bagi keberhasilan monopoli dagang yang dijalankan oleh VOC. Istilah "Betawi" mulai muncul pada periode kekuasaan Kolonial yang bercokol di Jakarta. Di bawah Panji Kolonial Jakarta berganti nama menjadi Batavia. Masyarakat atau orang Sunda yang wilayahnya dekat dengan Batavia menyebut orang Batavia dengan sebutan orang Betawi. Hal itu dapat dimengerti karena lidah orang Sunda sulit untuk mengatakan Batavia. Dari penyebutan itu-lah lambat laun dikenal istilah Betawi untuk menyebut penduduk Batavia (Wibowo, 2015).

Masyarakat Betawi menjadi saksi kekuasaan berbagai penguasa dari jaman ke jaman. Orang Betawi menjadi rakyat dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di sekitar Batavia. Mereka akhirnya mengalami masa-masa pahit yang sangat panjang, yaitu masa penjajahan. Pada abad ke-12 orang Betawi adalah sebagai rakyat kerajaan Pajajaran (Knight, 2014; Wibowo, 2015). Hubungan masyarakat Betawi dengan kerajaan Pajajaran sangat dekat disebabkan pelabuhan Sunda Kalapa yang dikuasai Pajajaran berada di Batavia. Raja Pajajaran menempatkan seorang adipati untuk mengurus pelabuhan Sunda Kalapa karena ibukota kerajaan Pajajaran berada di Pakuan, Bogor (Blusse, 2017).

Pelabuhan Sunda Kalapa sejak dikuasai Pajajaran sangat makmur karena banyak sekali kapal yang singgah di sana. Kemakmuran dari adanya pelabuhan Sunda Kalapa akhirnya terdengar oleh perkumpulan dagang Belanda (VOC). Awalnya VOC yang berekspedisi mencari rempah-rempah tidak berminat membuat pangkalan di Sunda Kalapa dan lebih memilih Ambon sebagai produsen rempah-rempah (Suryadi, 2015). Namun, pertimbangannya berubah karena letak Sunda Kalapa lebih dekat ke Eropa (Blusse, 2017). Hal tersebut menyebabkan VOC menyerbu dan menguasai Sunda Kalapa. Sejak saat itulah dimulainya kekuasaan dari kapitalis kolonialisme Belanda atas masyarakat Betawi dan dimulainya kuasa kapitalis kolonialisme terhadap praktik akuntansi Betawian.

VOC mengusir seluruh penduduk pribumi dari daerah pelabuhan Sunda Kalapa sehingga penduduk asli Betawi pun terusir dan tidak diijinkan bertempat ting-

gal di sana (Ittersum, 2010; Wibowo, 2015). Orang-orang Belanda yang bekerja untuk VOC moralnya banyak yang tidak baik, dan pejabat-pejabatnya banyak melakukan korupsi serta hidup sangat mewah (Blusse, 2017). Orang Betawi dilarang mengamen dari rumah ke rumah karena pengamen Betawi sering menyanyikan pantun yang berisi sindiran terhadap kerusakan moral orang Belanda (Manez, 2010). VOC juga memungut pajak yang tinggi pada penduduk asli Betawi yang bertani dan pajaknya (Hing, 2017) dipungut lewat tukang pungut pajak yang diangkat VOC, sehingga sering terjadi perlawanan rakyat terhadap tukang pungut pajak itu. VOC kemudian dinyatakan bangkrut dan meninggalkan banyak utang. Kekuasaan VOC yang oleh orang Betawi disebut kompeni berganti dengan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda yang disebut pemerintah kolonial saat itu mampu memberantas korupsi yang membangkrutkan VOC dan melakukan diskriminasi terhadap penduduk asli.

Saat itu perkebunan bertambah luas dan perdagangan berkembang sangat pesat di mana akuntansi dipraktikkan dan kuasa dari kolonialisme pun semakin kuat dan di sinilah Betawi sangat merasakan kuasa dari kolonialisme Belanda. Sejak pemerintah Belanda berkuasa muncul kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kolonial Belanda menerapkan sistem partikelir yakni tanah dijual kepada tuan tanah dan melarang masyarakat Betawi sebagai petani bebas (Booth, 2017). Kolonial Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa yang sangat kejam. Para petani pribumi dipaksa memberikan pengabdian kepada para tuan tanah serta membayar pajak yang sangat memberatkan. Para petani harus bekerja selama 60 hari tanpa upah dalam waktu setahun. Para petani menyerahkan seperlima atau lebih hasil panennya kepada para tuan tanah dan juga membayar pajak untuk tanaman rumah tangga (Blusse, 2017). Penindasan lainnya yaitu tentang kebijakan kerja rodi yang diterapkan untuk membangun Jalan raya Pos Anyer-Panarukan.

Kekejaman-kekejaman tersebut akhirnya menimbulkan perlawanan dan pemberontakan dari masyarakat Betawi yang dipelopori oleh para jago atau jawara. Pada masa itu muncul para tokoh jago yang dianggap membela masyarakat lemah. Beberapa jawara pada masa penjajahan di antaranya sebut saja Pitung. Pendekar Betawi ini dike-

nal dengan aksi heroiknya dalam membantu warga yang tertindas oleh penjajah. Selain itu, juga ada Sabeni, jawara asli Tanah Abang. Hingga kini sosok keduanya itu masih melekat terutama bagi mereka yang menekuni bela diri pencak silat.

Para jago Betawi muncul berbarengan dengan masalah sosial yang terkait dengan tanah partikelir atau perkebunan swasta yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Akhirnya semua hal tersebut akan berdampak dalam menimbulkan banyak eksploitasi di luar kemanusiaan. Praktik akuntansi pun pada akhirnya dianggap adil apabila ia memenuhi tujuannya, yaitu kebermanfaatannya bagi pemilik modal dalam hal ini kuasa koloni Belanda. Namun, praktik akuntansi itu menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu (masyarakat Betawi) melalui prosedur/birokrasi yang menekankan fungsionalitas semata dan bukan kemanusiaan.

Kuasa senantiasa ada dalam setiap gerakan pikiran ataupun tindakan manusia dan kuasa tidaklah harus melekat pada institusi, struktur, atau sistem (Anderson, 2017; Giraudeau, 2017). Kuasa sebagai sebuah nama yang diaplikasikan manusia di dalam atau kepada sebuah situasi strategis yang kompleks dalam suatu masyarakat tertentu. Kuasa juga bukan merupakan sesuatu yang diperoleh (didapatkan) atau pun sesuatu yang harus dibagi-bagikan. Namun, kuasa adalah relasi peran produktif dalam kehidupan sosial budaya (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015; Parker, 2015; Persson & Napier, 2014; Sumi, 2017). Sebagai sang kuasa, koloni Belanda menerapkan konsep kapitalis untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari masyarakat Betawi. Hal tersebut disebabkan oleh konsep utama kapitalisme adalah memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran seminimal mungkin, karena kekayaan telah menjadi simbol status dalam sistem kapitalis. Sistem ini mengefisiensikan biaya dan meningkatkan laba sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya suatu masyarakat yang sudah diwarnai oleh sifat mental kapitalis akan tampak pada kehidupan yang diarahkan pada penguasaan hasil produksi, penghematan uang, dan mekanisme persaingan (Sanders, 2016).

Kekayaan sebagai simbol status dalam sistem kapitalis menjadikan pengukurannya tidak lagi pada kualitas manusianya, tetapi

lebih pada jumlah atau kuantitas harta yang dimilikinya. Pengembangan dalam sistem kapitalis adalah ditimbulkannya semangat individualistis, baik dalam berkonsumsi maupun memproduksi (Sanders, 2016; Badua & Racca, 2017). Sistem kapitalis tidak lagi memandang kejujuran sebagai ukuran solidaritas dan keluhuran berperilaku. Kemampuan berkompetisi untuk meraih sesuatu yang tertinggi, terbanyak, dan terbesar membuat orang berkonsumsi dalam jumlah banyak untuk meraih status agar dapat masuk dan bertahan dalam sistem kapitalis. Akhirnya kapitalisme bukan lagi sekadar sistem perekonomian melainkan telah mencampuri nilai-nilai dan arah tujuan kehidupan (Toms, 2010b).

Kapitalisme tersebut sangat jelas terlihat pada sistem kuasa kolonialisme Belanda. Misalnya kuasa dalam hal pemungutan pajak dan dendanya yang sewenang-wenang pada masyarakat Betawi. Kuasa sebagai suatu kapasitas yang dimiliki kolonialisme Belanda telah menghasilkan pengaruh besar terhadap pemungutan pajak yang dilakukan pada masyarakat Betawi saat itu. Konsep kapitalis yang dimiliki kolonial Belanda pada masyarakat Betawi dalam memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya di daerah tersebut adalah dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh kolonialisme Belanda tersebut merupakan sebuah modal besar yang akan digunakan oleh para pejabat pemungut pajak untuk mempengaruhi dan menguasai masyarakat Betawi agar taat serta mendukung aturan-aturan perpajakan tersebut.

Setiap kekuasaan mempunyai pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki oleh kapitalisme kolonial Belanda dalam menguasai wilayah Batavia memungkinkan dalam pelaksanaan kekuasaannya. Semakin berkembangnya pengetahuan kolonial Belanda tentang ilmu kuasa kapitalisme kolonialisme, makin menambah pengetahuan tentang cara kerja kekuasaan yang dapat dijalankannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kuasa tidaklah selalu bekerja melalui suatu ancaman atau intimidasi melainkan bekerja pertama kali lewat aturan-aturan dan normalisasi (Sitorus, Triyuwono, & Kamayanti, 2017), seperti yang dilakukan Belanda dalam memberikan aturan-aturan tentang perpajakan saat itu. Disiplin terhadap aturan-aturan dan normalisasi merupakan konsep kunci dalam memahami kuasa yang dimiliki kolonialisme Belanda. Teknik

kekuatan yang bersumber dari kuasa tersebut akhirnya akan membentuk kepatuhan dalam masyarakat Betawi baik dalam hal pemungutan pajak maupun aturan pembayaran dendanya.

Kuasa yang dimiliki oleh kapitalisme Belanda dalam pelaksanaan wilayah kolonialisme tidak terpisah dari pengetahuan yang dimiliki oleh kapitalisme Belanda. Pengetahuan tentang politik pemerintahan kolonial dan ekonomi secara tidak langsung telah menghadirkan keberadaan akuntansi di masa kolonialisme Belanda. Pengetahuan yang dimiliki oleh kapitalis Belanda dengan sendirinya mempengaruhi dan membentuk pola berpikir bagi kolonial Belanda. Pola pikir tersebut setelah melalui suatu proses interaksi akan direfleksikan dalam suatu bentuk buah pikiran dan aksi, di mana aksi tersebut adalah kuasa.

Akhirnya Betawi berada dalam genggaman kuasa kolonialisme Belanda. Belanda sebagai sang kapitalis yang memiliki modal saat itu merupakan pemegang kuasa masyarakat Betawi, berupaya mempraktikkan sistem kapitalismenya. Hal tersebut tergambar jelas sebagai cerminan sistem kapitalisme dalam rangka untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan laba, sehingga akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Namun, cermin ketidakadilan dengan berbagai pembangkangan terhadap sistem hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku terlihat juga pada masyarakat Betawi dengan berbagai perlawanan yang diberikan (seperti perlawanan si Pitung dari Betawi). Walau perlawanan terus dilakukan terhadap ketidakadilan sang kuasa, jika terdapat keberpihakan pemerintah terhadap kaum kapitalis, yang menganggap hal tersebut memiliki keadilan, maka praktik akuntansi pun pada akhirnya dianggap adil apabila ia memenuhi tujuannya, yaitu kebermanfaatannya bagi pemilik modal (kapitalis).

Praktik akuntansi (pengetahuan) Betawian. Sejarah bukan hanya sekedar penghimpunan peristiwa yang dijadikan acuan dan bukti adanya hubungan sejumlah peristiwa. Terbentuknya suatu sejarah dapat dikatakan melalui suatu proses dengan tujuan yang belum diketahui kepastiannya. Foucault lebih lanjut menyatakan bahwa setiap masa dalam sejarah memiliki suatu sistem pemikiran yang tentunya sangat menentukan bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipraktikkan pada masa itu. Penelitian sejarah akuntansi saat ini lebih menggu-

nakan penelaahan suatu peristiwa penting seperti kasus-kasus unik yang terjadi pada abad di masa lampau. Hal itu sebagai sarana untuk memperoleh beberapa wawasan ke dalam situasi saat ini. Tema umum penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa akuntansi memainkan suatu peranan mendalam dan kompleks sehingga perlu untuk diteliti, digali, dan dieksplorasi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang memadai tentang bagaimana individu dikendalikan tidak terbatas pada kasus penggunaan alat catatan dan kalkulasi (Samiolo, 2017).

Untuk mengetahui akuntansi secara lebih mendalam sebaiknya mengerti terlebih dahulu definisi atau batasan dari akuntansi itu sendiri. Di Indonesia perkembangan akuntansi sebagai suatu seni didasarkan pada logika matematika yang sampai sekarang dikenal sebagai pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*). *Double-entry bookkeeping* yang sudah dipahami di Italia sejak tahun 1494 pada saat Luca Pacioli (1445-1517) mempublikasikan bukunya tentang pembukuan di Venice Italia (Bryer, 2016; Lana-Berasain, 2017; Sangster, 2016). Sejak saat itu pengertian akuntansi di Indonesia mengalami perkembangan mencakup pencatatan, pengukuran, peringkasan, dan pengungkapan informasi yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk membuat alokasi sumber daya di dalam organisasi bisnis dan nonbisnis (Gordon, 2016).

Dominasi penelitian sejarah akuntansi selama ini tidak lepas dari pembukuan *double-entry bookkeeping*. Sejalan dengan kondisi tersebut, akuntansi memiliki sejarah panjang di mana dari awal kemunculannya mengalami perkembangan terhadap pengertian akuntansi itu sendiri bergantung dari sudut pandang dan penekanan yang digunakan dalam memandang akuntansi (Budiasih, 2012). Kondisi demikian menarik perhatian peneliti sejarah akuntansi untuk menggunakan pemikiran Foucault dalam rangka menganalisis sejarah sehingga sejarah akuntansi tidak hanya tertuju pada asal usul akuntansi yang identik dengan perkembangan *double-entry bookkeeping* tersebut.

Dalam rangka memahami suatu kondisi pengetahuan yang ada pada masyarakat, khususnya masyarakat Betawi pada masa kolonial Belanda, haruslah dilihat bagaimana pola penyebaran pengetahuan yang ada. Proses distribusi pengetahuan akan mengakibatkan sebuah rezim kebenaran atas pe-

ngetahuan tersebut yang akan menentukan apa yang dianggap benar dan tidak benar dalam sejarah. Perkembangan praktik akuntansi pada masa tertentu dapat dilihat dari segi pertumbuhan perekonomiannya. Hal ini disebabkan semakin maju perekonomian suatu masyarakat semakin berkembang pesat praktik akutansinya. Pesatnya perdagangan di wilayah Batavia membuka peluang masuknya penyebaran pengetahuan dari luar wilayah. Salah satunya adalah perkembangan angka Hindu-Arab yang mempermudah timbulnya akuntansi modern seperti sekarang ini. Pengetahuan akuntansi terlihat pada pemakaian angka Hindu-Arab yang dibawa oleh muslim Spanyol ke Eropa Barat ketika pelajar Eropa mengadopsi matematika muslim (Zaid, 2004). Perkembangan angka Hindu-Arab ini di Eropa Barat kemudian menyebar ke seluruh dunia (Budiasih, 2012) termasuk juga ke Indonesia.

Pengetahuan akuntansi bukan merupakan pengungkapan secara samar-samar dari relasi kuasa melainkan pengetahuan yang berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kuasa menyelenggarakan pengetahuan karena pengetahuan juga berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi bahwa untuk mengetahui kuasa dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kuasa tersebut (Campbell & Kelly, 2013; Flew, 2015; Lemke, 2015). Hal ini disebabkan setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana tertentu menghasilkan pengetahuan tertentu yang akhirnya akan menimbulkan efek kuasa. Namun, Foucault berpendapat bahwa pengetahuan akuntansi dalam hal ini bukanlah sebagai suatu hal yang turun dari langit dan bukan juga sebagai sebuah konsep yang abstrak (Helden & Uddin, 2016). Namun, pengetahuan akuntansi tersebut diproses karena setiap kuasa menghasilkan dan memproses pengetahuan itu sendiri.

Akuntansi di Indonesia yang sudah tumbuh pesat sampai saat ini bukan tiba-tiba ada seperti turun dari langit. Namun, merupakan perkembangan dari sejarah akuntansi di Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan (Budiasih, 2012). Berasal dari berbagai sumber kajian yang ada dapat dikatakan bahwa akuntansi pada masa lalu merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

(Lutfillah, 2014; Lutfillah & Sukoharsono, 2013), dan akuntansi itu sendiri memiliki konsekuensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Kamayanti, 2016) masyarakat pada masa itu. Jadi, praktik-praktik akuntansi pada masa itu lebih banyak menggambarkan kegiatan-kegiatan akuntansi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban dari rakyat kepada pemerintah.

Awalnya praktik-praktik akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh negara Cina dan India karena adanya suatu hubungan perdagangan yang dapat diketahui dari berbagai catatan sejarah (Budiasih, 2012). Pada abad ke-15 Romawi jatuh dan pusat perdagangan berpindah ke Belanda sehingga perkembangan akuntansi saat itu pun menggunakan sistem kolonial Belanda. Kedatangan VOC Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda mengakibatkan praktik-praktik akuntansi yang dilakukan di Indonesia akhirnya mengikuti sistem akuntansi kolonial Belanda (Hing, 2017).

Pada masa kolonialisme Belanda juga mulai terlihat perkembangan akuntansi bagi masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi dianggap sebagai masyarakat yang paling maju pertumbuhan perekonomiannya saat itu karena sebagai pusat perdagangan di pelabuhan Sunda Kalapa. Walaupun memiliki kemajuan dalam tingkat pertumbuhan perekonomian, kebanyakan orang Betawi asli pada masa itu bekerja sebagai budak dan pelayan tingkat rendah, dan sedikit yang memiliki tingkat pendidikan tinggi kecuali mereka yang berhubungan dekat dengan kaum elit kolonial Belanda (Knörr, 2009). Akibatnya, orang Betawi tertindas oleh kekuasaan kolonial Belanda karena pengetahuan yang dimilikinya rendah. Hing (2017) mengungkapkan tentang kemunculan akuntansi di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda yang menggunakan akuntansi sebagai suatu institusi dan teknik disiplin dengan tidak hanya menyediakan teknik kalkulasi tetapi juga memiliki peran berbeda dalam kehidupan sosial masyarakat yang sangat kompleks. Hal tersebut jelas terlihat pada hubungan perdagangan yang dilakukan baik antardaerah maupun pulau, adanya pasar beserta alat pertukaran yang digunakan dan komoditas yang diperdagangkan, dan ketentuan pajak yang dikenakan oleh penguasa pada masa itu (Budiasih, 2012; Budiasih, 2014), yang memperlihatkan bahwa pada jaman itu akuntansi telah sangat

dikenal masyarakat (Budiasih, 2012).

Perkembangan penerapan praktik akuntansi pada masyarakat Betawi muncul dari pelaksanaan sistem kolonialisme Belanda dan akuntansi mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan harga, biaya, dan keuntungan. Praktik akuntansi Betawian pada masa kolonialisme Belanda sangat terlihat pada transaksi untuk pencatatan keuangan seperti transaksi perpajakan dan transaksi lainnya yang ditulis dalam bentuk bahasa Jawa kuno baik dalam penulisan prasasti maupun kitab kuno lainnya. Helden & Uddin (2016) menyebutkan bahwa perkembangan praktik akuntansi pada masa itu tidak hanya membawa dampak dalam kehidupan beragama tetapi juga berpengaruh pada pengetahuan baru dalam memperkenalkan kertas sebagai media tulis menulis. Kemajuan sistem perdagangan pada masa itu didukung dengan diperkenalkannya uang logam untuk transaksinya dan juga untuk kepentingan pemerintah terutama dalam hal pemungutan pajak dan denda kepada rakyatnya (Budiasih, 2014).

Praktik akuntansi yang terjadi pada masyarakat Betawi atau praktik akuntansi Betawian tergambarkan dari pencatatan setiap transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Betawi pada masa kolonialisme Belanda. Pola akuntansi yang terbentuk pada masyarakat Betawi tersebut dapat digambarkan dari berbagai transaksi perdagangan dengan menggunakan alat tukar uang dengan berbagai perhitungannya (Hing, 2017). Hal ini sangat terlihat dari sistem pemungutan pajaknya berdasarkan atas ketentuan jenis dan tarif pajak serta dendanya yang sesuai dengan aturan kolonial Belanda di Batavia pada masa itu. Penentuan ini pastilah memerlukan suatu perhitungan dan administrasi yang tidak sederhana, yang sebenarnya merupakan suatu dasar akuntansi (Budiasih, 2012).

Betawi sekarang digunakan sebagai sebuah nama identitas etnik meski identifikasi kelompok sosial ini relatif baru. Selain bahasa yang tidak mengenal hierarki, sifat egaliter orang Betawi bisa ditunjukkan saat mereka menerima pendatang atau ketika mereka pindah ke wilayah lain. Orang Betawi tidak pernah mengajak tetangga sebelahnya walau sesama orang Betawi, bahkan ada pula yang tidak memberitahukan ke mana mereka akan pindah (Raden & Andrijanto, 2017). Kecenderungan ini mungkin

dipengaruhi oleh kebiasaan sejak jaman VOC di mana Jakarta selalu dibanjiri oleh para imigran dari berbagai etnis. Akan tetapi kecenderungan ini bisa ditafsirkan sebagai kesadaran orang Betawi dalam pembentukan etnisitas yang tidak mengakar sehingga ingatan geografis mereka pendek (Gentelli, 2016; Nadri, 2015).

Pemahaman tentang pengetahuan akuntansi oleh masyarakat Betawi saat itu lebih terlihat ke arah pengetahuan strategi secara naratif, seperti yang dilakukan pada sebuah pertunjukan. Strategi naratif yang sering digunakan oleh masyarakat Betawi tersebut adalah humor. Hal ini digunakan karena humor melekat erat dalam budaya Betawi. Di samping itu, humor juga dianggap cara yang paling nyaman dalam menyikapi masalah sosial yang disebabkan oleh adanya fiksasi identitas budaya. Selain itu, pemahaman terhadap pengetahuan akuntansi oleh masyarakat Betawi saat itu berhubungan erat dengan masalah sosial terkait tanah partikelir atau perkebunan swasta yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan menimbulkan banyak eksploitasi di luar kemanusiaan.

Praktik akuntansi Betawian dalam perangkat kuasa kapitalisme. Foucault telah menciptakan hubungan antara kuasa dan pengetahuan, di mana antara kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kuasa akan menciptakan entitas pengetahuan, sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan pengaruh pada kuasa. Tidak ada praktik pelaksanaan kekuasaan dalam kenyataannya yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi dari kuasa. Pengetahuan dibentuk dan diproduksi melalui sebuah proses dan mekanisme kuasa (Suyono, 2001). Pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri dalam kerangka kebenaran objektif. Namun, pengetahuan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses dan mekanisme kuasa karena pengetahuan dibentuk dan diproduksi melalui sebuah proses dan mekanisme kuasa itu sendiri (Edgley, 2010). Bagi Foucault kuasa selalu teraktualisasi lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kuasa. Tidaklah mungkin suatu kuasa tidak ditopang dengan suatu pengetahuan. Penyelenggaraan kuasa yang terus menerus

akan menciptakan entitas pengetahuan. Begitu juga sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kuasa.

Akuntansi terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi dan politik di mana akuntansi itu berada. Kondisi tersebut mengakui akan keberadaan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melekat pada akuntansi. Akuntansi merupakan anak dari budaya masyarakat di mana akuntansi itu dipraktikkan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai budaya masyarakat memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi bentuk akuntansi tersebut (Ohlson, 2015; Rutherford, 2013). Berdasarkan hal tersebut akuntansi dapat direkonstruksi, ditafsirkan kembali, serta dapat diartikulasi berdasarkan posisi sosial, politik, dan budaya yang beragam. Kondisi ini membawa pada situasi bagaimana artefak akuntansi beroperasi dan mempunyai peran penting dalam artikulasi diskursif di wilayah kolonialisme Belanda pada wilayah Batavia yang disebut akuntansi Betawian.

Kolonialisme memberikan suatu bentuk penindasan (Sian, 2011). Kolonialisme Belanda sebagai sang kapitalis yang menjadikan pengetahuan dengan kuasanya yang kuat mampu membentuk pola pikir individu menjadi pola pikir yang akan menghasilkan praktik akuntansi Betawian dengan warna kapitalisme. Kedudukan kapitalisme ini secara implisit akhirnya mengakibatkan bentuk akuntansi menjadi bias terhadap materi, tidak memperhatikan eksternalitas, bias terhadap maskulinitas, dan berorientasi pada informasi berbasis angka (Triyuwono, 2016). Orientasi pada angka-angka akuntansi ini menjadikan realitas sosial oleh akuntansi berpusat pada angka yang akan dibentuk dan dampaknya informasi yang dimunculkan menjadi sangat parsial karena tereduksi oleh bentuk angka-angka yang diinginkan (Killian & O'Regan, 2016; Loo & Lowe, 2017). Realitas sosial praktik akuntansi juga otomatis akan terbentuk dengan semua interaksi dengan nilai-nilai kapitalisme sebagai landasan utamanya (Robertson & Funnell, 2012). Maka, tanpa disadari ternyata perilaku yang terjadi dalam realitas sosial dan praktik bisnis yang serba kapitalis itu akhirnya akan membentuk pengetahuan akuntansi itu sendiri. Hal tersebut juga akan mengakibatkan terkontaminasi dengan karakteristik kapitalisme yang kuat sehingga praktik akuntansi pun ikut terperangkap dan tidak bisa melepaskan diri. Dengan kata

lain, telah terjadi hubungan yang terjalin sangat kuat antara kuasa kapitalisme praktik akuntansi Betawian.

Perspektif Foucauldian memandang bahwa akuntansi dilihat dari segi praktiknya tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja tetapi melihatnya sebagai suatu fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang begitu kompleks. Kuasa dalam perspektif Foucauldian tidak hanya terkonsentrasi dan terpusat pada para penguasa yang sedang berkuasa dalam organisasi formal tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk ilmu pengetahuan (Lutfillah, 2014; Edgley, 2010). Berbagai aktivitas yang menjadi ciri adanya peradaban dalam suatu kehidupan, misalnya tergambarkan pada sekelompok orang yang bekerja sama, adanya pasar dan pertukaran, pembayaran pajak kepada negara, dapat berlangsung karena adanya akuntansi (Budiasih & Sukoharsono, 2012). Oleh karena itu, praktik akuntansi dengan kekuasaan dan pengetahuannya dapat menjadi suatu dasar atau pondasi bagi berdirinya suatu peradaban. Berdasarkan berbagai sumber tergambar bahwa praktik akuntansi Betawian pada masa kolonialisme Belanda terlihat secara jelas baik pada pelaksanaan pemungutan pajak maupun penetapan dendanya yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh para pejabat pemungut pajak.

Praktik akuntansi dibentuk oleh lingkungan sosialnya dan sekaligus membentuk lingkungan sosial itu sendiri. Akuntansi sebagai suatu ilmu sosial, praktiknya juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kapitalisme. Kapitalisme akan dapat mengubah perilaku dalam hubungannya dengan praktik akuntansi di lingkungannya disebabkan akuntansi itu merupakan ilmu sosial yang praktiknya selalu berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan sosial yang membentuk akuntansi tersebut adalah lingkungan kapitalisme, perkembangan praktik akuntansi sebagai suatu ilmu sosial juga akan berlandaskan kapitalisme (Edgley, 2010; Robertson & Funnell, 2012). Akhirnya akuntansi pun akan dibangun dalam upaya untuk mengakomodasi sifat oportunistis-kapitalis manusia. Hal ini mengakibatkan hubungan yang sangat erat antara praktik akuntansi dan kapitalisme yang akhirnya dapat menimbulkan adanya perkembangan praktik akuntansi yang berdampingan dengan kapitalisme itu sendiri.

Kapitalisme muncul dan sangat jelas terlihat pada sistem kuasa kolonialisme (Sian, 2011) Belanda. Konsep kapitalisme yang dimiliki kolonial Belanda pada masyarakat Betawi terlihat dalam rangka memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya di daerah tersebut dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Kuasa kapitalisme sangat kental dengan prinsipnya yang lebih mengutamakan profit (Toms, 2010a). Hal ini tercermin juga dengan kuasa sebagai suatu kapasitas yang dimiliki kolonialisme Belanda untuk menghasilkan pengaruh besar yang dikehendaki terhadap pemungutan pajak yang dilakukan pada masyarakat Betawi saat itu. Kekuasaan yang dimiliki itu merupakan sebuah modal besar yang akan digunakan oleh para pejabat pemungut pajak untuk mempengaruhi dan menguasai masyarakat Betawi agar ikut dan taat serta mendukung aturan-aturan perpajakan tersebut.

Kapitalisme sebagai kuasa yang kuat mampu membentuk pola pikir masyarakat menjadi pola pikir yang akan menghasilkan praktik akuntansi dengan warna kapitalisme yang mengutamakan profit (Toms, 2010a; Robertson & Funnell, 2012). Realitas sosial praktik akuntansi juga otomatis akan terbentuk dengan semua interaksi dengan nilai-nilai profit kapitalisme sebagai landasan utamanya (Robertson & Funnell, 2012). Tanpa disadari ternyata perilaku yang terjadi dalam realitas sosial yang serba kapitalis akhirnya akan sangat membentuk pengetahuan akuntansi itu sendiri. Pengetahuan akuntansi itu pun akan terkontaminasi karakteristik kapitalisme yang kuat sehingga praktik akuntansinya pun akhirnya ikut terperangkap. Hal tersebut disebabkan landasan dan motivasi kapitalisme yang selalu berupaya untuk mengefisienkan biaya dan meningkatkan laba, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dalam hal ini kolonialisme Belanda.

Berdasarkan perspektif Foucauldian akuntansi dapat dilihat sebagai suatu kuasa dan pengetahuan (*power-knowledge*) yang mampu membentuk perilaku dan juga budaya manusia dalam kehidupannya, misalnya pemungutan pajak (Edgley, 2010) dan denda yang dilakukan kolonialisme Belanda terhadap masyarakat Betawi. Hubungan antara kuasa kapitalis yang sangat kuat terhadap praktik akuntansi Betawian menyebabkannya terperangkap dan tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan kuasa kapitalis. Berdasarkan perspektif Foucauld-

ian atas praktik akuntansi Betawian pada masa kolonialisme Belanda terlihat dalam hal pemungutan pajak dan dendanya yang merupakan fenomena politik, sosial, dan ekonomi yang sangat kompleks yang juga terjalin dalam konsep *power-knowledge*. Praktik kuasa dalam kolonialisme Belanda sebagai suatu penggerak sosial dan perekonomian dalam masyarakat Betawi sangat erat hubungannya dengan praktik akuntansi. Kuasa (*power*) dari kolonialisme Belanda merupakan suatu mekanisme yang dapat menciptakan rasionalitas atas kebenaran/pengetahuan (*knowledge*) yaitu dalam hal pemungutan pajak ataupun dendanya sebagai sebuah alat untuk menegakkan kuasanya.

Akuntansi merupakan fasilitator yang digunakan oleh kolonialisme Belanda dalam menentukan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengendalian dan pelanggaran kapitalismenya di wilayah Batavia. Pengetahuan akuntansi berfungsi bukan hanya sebagai alat finansial semata melainkan juga bermanfaat dalam lingkungan yang mengalami perubahan. Akuntansi digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan pengawasan dan otoritas sosial ekonomi atas jaringan ekonomi wilayah kolonial Belanda di Batavia dalam kaitannya dengan sektor perdagangan sebagai mekanisme integral dari pengembangan jaringan administrasi penguatan wilayah kolonial dengan cara penetapan aturan-aturan dan kebijakan perpajakan, pertanian, dan perdagangan. Pengetahuan akuntansi Betawian pada masa koloni Belanda juga berfungsi sebagai instrumen dalam hal politik untuk wilayah kolonial Belanda di Batavia. Keadaan tersebut menggambarkan kompleksitas akuntansi dalam struktur jaringan kekuasaan dan pengetahuan pada wilayah kolonial Belanda di Batavia. Hal tersebut secara tidak langsung memberi suatu gambaran tentang peran akuntansi dalam rangka mendisiplinkan masyarakat dan juga sebagai kekuatan politik (akuntansi sebagai *disciplinary power*) dalam mengendalikan masyarakat di wilayah kolonial Belanda di Batavia.

Jika gambaran tentang praktik akuntansi Betawian yang telah dikuasai pihak kapitalis kolonialisme Belanda, dapat dikatakan bahwa terdapat strategi yang didesain pihak penguasa saat itu untuk melanggengkan kuasanya. Dalam hal ini diseminasi pemikiran akuntansi pun memerlukan sebuah strategi. Misalnya, dalam rangka

mengukuhkan eksistensi International Financial Reporting Standard (IFRS), terlihat adanya jaringan kuasa antara perusahaan multinasional dan dewan standar yang berusaha untuk menekan kuasa pemerintah melalui kesepakatan pasar bebas. Sebuah konsep yang kemungkinan besar didesain oleh pihak penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan perspektif Foucauldian praktik akuntansi tidak hanya dipandang dari satu sudut pandang saja. Namun, melihatnya sebagai suatu fenomena ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat yang kompleks serta yang terjalin dengan konsep *power-knowledge*. Konsep *power-knowledge* dari perspektif Foucauldian menggambarkan hubungan antara kuasa dan pengetahuan, di mana antara keduanya berjalan berdampingan untuk saling menguasai, mengontrol, serta menundukkan manusia. Sejalan dengan konsep *power-knowledge* tersebut, diyakini bahwa kekuasaan dapat menjadi kekuatan yang membentuk perilaku dan juga budaya masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Akhirnya, kekuatan yang membentuk perilaku tersebut akan menjadi kekuatan yang memiliki peran dalam membentuk pondasi praktik akuntansi masyarakat Betawi pada masa kolonialisme Belanda.

Praktik akuntansi yang terjadi pada masyarakat Betawi atau praktik akuntansi Betawian, terlihat dari transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Betawi pada masa kolonialisme Belanda. Pengetahuan akuntansi pada masyarakat Betawi saat itu muncul dari pelaksanaan sistem kolonialisme Belanda dan akuntansi mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan harga, biaya, dan keuntungan. Pemahaman terhadap pengetahuan akuntansi oleh masyarakat Betawi saat itu berhubungan erat dengan masalah sosial terkait tanah partikelir yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan menimbulkan banyak eksploitasi di luar kemanusiaan.

Kuasa adalah suatu kapasitas yang dimiliki kolonialisme Belanda untuk menghasilkan pengaruh besar terhadap pemungutan pajak yang dilakukan pada masyarakat Betawi saat itu. Kuasa yang dimiliki kolonialisme Belanda sebagai suatu penggerak sosial dan perekonomian masyarakat Betawi san-

gat erat hubungannya dengan pengetahuan tentang praktik akuntansi. Kuasa (*power*) dari kapitalis kolonialisme Belanda merupakan suatu mekanisme yang dapat menciptakan pengetahuan (*knowledge*) yaitu dalam hal pemungutan pajak dan dendanya sebagai alat untuk melanggengkan kuasanya. Selain itu, ulasan mengenai kuasa pengetahuan akuntansi pada masyarakat Betawi dalam wilayah kolonial Belanda melahirkan suatu konstruksi kekuasaan akuntansi yang dilakukan melalui aktivitas perpajakan ataupun perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi dan kuasanya berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan terutama yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan sehubungan dengan perdagangan dan perpajakan. Peran tersebut tergambar secara jelas dalam hal pengawasan dan pengambilan keputusan atas aturan-aturan dan kebijakan kolonialisme tentang pajak dan perdagangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, M. (2017). Accounting History Publications 2016. *Accounting History Review*, 27(3), 279-286. <https://doi.org/10.1080/21552851.2017.1374975>
- Armstrong, P. (2015). The Discourse of Michel Foucault: A Sociological Encounter. *Critical Perspectives on Accounting*, 27, 29-42. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.10.009>
- Badua, F., & Racca, J. C. (2017). Pacioli, Profit, and Positivism: How Inherited Professional and Academic Traditions Have Stymied Accounting Scholarship. *Accounting Historians Journal*, 44(2), 99-108. <https://doi.org/10.2308/aahj10-535>
- Ball, S. J. (2015). Accounting for a Sociological Life: Influences and Experiences on the Road from Welfarism to Neoliberalism. *British Journal of Sociology of Education*, 36(6), 817-831. <https://doi.org/10.1080/01425692.2015.1050087>
- Bigoni, M., & Funnell, W. (2015). Ancestors of Governmentality: Accounting and Pastoral Power in the 15th Century. *Critical Perspectives on Accounting*, 27, 160-176. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.05.001>
- Bisman, J. (2011). Old Fossils and Accounting History. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(7), 935-935. <https://doi.org/10.1108/09513571111161657>

- Blusse, L. (2017). The Kai Ba Lidai Shiji An Autonomous History of the Chinese Community of Batavia/ Jakarta in the VOC Period. *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 18(2), 385-401. <http://dx.doi.org/10.17510/wacana.v18i2.589>
- Booth, A. (2017). Globalization and the Colonial Origins of the Great Divergence: Intercontinental Trade and Living Standards in the Dutch East India Company's Commercial Empire, c. 1600–1800. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(1), 101-103. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1296377>
- Bryer, R. (2016). Linking Pacioli's Double-entry Bookkeeping, Algebra, and Art: Accounting History or Idle Speculation? *Accounting History Review*, 26(1), 33-40. <https://doi.org/10.1080/21552851.2015.1129081>
- Budiasih, I. G. A. N. (2012). *Konstruksi Praktik-Praktik Akuntansi pada Masa Pemerintahan Raja Udayana di Bali: Pendekatan Etnoarkeologi*. Universitas Brawijaya.
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Fenomena Akuntabilitas Perpajakan pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 409-420. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5030>
- Budiasih, I. G. A. N. (2016). Social and Environment Accounting Practices at the Time of the Ancient Bali. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219, 145–151. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.056>
- Budiasih, I. G. A. N., & Sukoharsono, E. G. (2012). Accounting Practices and The Use of Money in The Reign of King Udayana in Bali: An Ethnoarcheological Approach. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 15(3), 259-278.
- Campbell, P., & Kelly, P. (2013). In/Between Between Feminism and Foucault: Iraqi Women's War Blogs and Intellectual Practices of the Self. *Critical Sociology*, 39(2), 183-199. <https://doi.org/10.1177/0896920511431851>
- Carnegie, G. D. (2014). The Present and Future of Accounting History. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(8), 1241-1249. <https://doi.org/10.1108/AAJ-05-2014-1715>
- Durepos, G., & Mills, A. J. (2017). ANTi-History, Relationalism and the Historic Turn in Management and Organization Studies. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 12(1), 53-67. <https://doi.org/10.1108/QROM-07-2016-1393>
- Edgley, C. R. P. (2010). Backstage in Legal Theatre: A Foucauldian Interpretation of "Rationes Decidendi" on the Question of Taxable Business Profits. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(7), 560-572. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.03.008>
- Edwards, J. R. (2011). Accounting on English Landed Estates During The Agricultural Revolution - A Textbook Perspective. *Accounting Historians Journal*, 38(2), 1-45. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.38.2.1>
- Flew, T. (2015). Foucault, Weber, Neoliberalism and the Politics of Governmentality. *Theory, Culture & Society*, 32(7), 317-326. <https://doi.org/10.1177/0263276415607605>
- Haka, S. F. (2016). Commentary: Looking Back at Accounting's Genesis and Looking Forward at Our Challenges. *Journal of Management Accounting Research*, 28(3), 55-61. <https://doi.org/10.2308/jmar-10502>
- Giraudeau, M. (2017). The Farm as an Accounting Laboratory: An Essay on the History of Accounting and Agriculture. *Accounting History Review*, 27(2), 201-215. <https://doi.org/10.1080/21552851.2017.1314014>
- Gebreiter, F., & Ferry, L. (2016). Accounting and the 'Insoluble' Problem of Health-Care Costs. *European Accounting Review*, 25(4), 719-733. <https://doi.org/10.1080/09638180.2016.1187073>
- Gentelli, L. (2016). Provenance Determination of Silver Artefacts from the 1629 VOC Wreck Batavia Using LA-ICP-MS. *Journal of Archaeological Science: Reports*, 9, 536-542. <https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.08.044>
- Gordon, A. (2016). An Economic History of Indonesia 1800–2010. *Journal of Contemporary Asia*, 46(4), 736-738. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1153131>
- Helden, J. V., & Uddin, S. (2016). Public Sector Management Accounting in Emerging Economies: A Literature Review. *Critical Perspectives on Accounting*, 41, 34-62. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.01.001>

- Hing, L. (2017). Indonesian and Malaysian History from Dutch Sources: Reconstructing the Straits of Malacca's Past. *SEJARAH: Journal of the Department of History*, 4(4), 21-36. <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol4no4.2>
- Hollingsworth, K. (2012). Examining Frank Adair Jr. as an African American CPA Pioneer: A Historical Note. *The Accounting Historians Journal*, 39(2), 81-95. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.39.2.81>
- Ittersum, M. J. V. (2010). The Long Goodbye: Hugo Grotius' Justification of Dutch Expansion Overseas, 1615-1645. *History of European Ideas*, 36(4), 386-411. <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2010.05.003>
- Kamayanti, A. (2016). Fobi(A)Kuntansi: Pui-sisasi: Pui-sisasi dan Refleksi Hakikat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7001>
- Killian, S., & O'Regan, P. (2016). Social Accounting and the Co-creation of Corporate Legitimacy. *Accounting, Organizations and Society*, 50, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.02.004>
- Knight, G. R. (2014). Commodity Chains, rs of the Batavia Firm of Maclaine Watson (1820-1840). *South East Asia Research*, 22(1), 87-101. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0190>
- Knörr, J. (2009). "Free the Dragon" versus "Becoming Betawi": Chinese Identity in Contemporary Jakarta. *Asian Ethnicity*, 10(1), 71-90. <https://doi.org/10.1080/14631360802628467>
- Kornbergera, M., Pfluegerb, D., & Mouritsenb, J. (2017). Evaluative Infrastructures: *Accounting for Platform Organization*. *Accounting, Organizations and Society*, 60, 79-95. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.05.002>
- Kumarasinghe, S. (2011). A Counting History. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(1), 132-132. <https://doi.org/10.1108/09513571111098081>
- Kurnia, L. (2011). Pasar Baru: Colonial Space and Contemporary Hybridity. *Inter-Asia Cultural Studies*, 12(4), 552-567. <https://doi.org/10.1080/14649373.2011.603918>
- Kusdewanti, A., Setiawan, A., Kamayanti, A., & Mulawarman, A. (2014). Akuntansi Bantengan : Perlawanan Akuntansi Indonesia melalui Metafora Bantengan dan Topeng Malang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 149-169. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5013>
- Lana-Berasain, J.M. (2017). Accounting for the Commons: Bookkeeping and the Stewardship of Natural Resources in Northern Spain (Sixteenth to Twentieth Centuries). *Accounting History Review*, 27(3), 223-248. <http://dx.doi.org/10.1080/21552851.2017.1359100>
- Lemke, T. (2015). New Materialisms: Foucault and the 'Government of Things'. *Theory, Culture & Society*, 32(4), 3-25. <https://doi.org/10.1177/0263276413519340>
- Loo, I. D., & Lowe, A. (2017). "[T]here are Known Knowns ... Things We Know that We Know": Some Reflections on the Nature and Practice of Interpretive Accounting Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(8), 1796-1819. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2015-2164>
- Lutfillah, N. Q. (2014). Akuntansi dalam Penetapan Sima Masa Jawa Kuno. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 262-272. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5018>
- Lutfillah, N. Q., & Sukoharsono, E. G. (2013). Historiografi Akuntansi Indonesia Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 75-84. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7183>
- Manez, K. S. (2010). Java's Forgotten Pearls: The History and Disappearance of Pearl Fishing in the Segara Anakan lagoon, South Java, Indonesia. *Journal of Historical Geography*, 36(4), 367-374. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2010.03.004>
- Modell, S. (2017). Critical Realist Accounting Research: In Search of its Emancipatory Potential. *Critical Perspectives on Accounting*, 42, 20-35. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.03.001>
- Nadri, G. A. (2015). Sailors, Zielverkopers, and the Dutch East India Company: The Maritime Labour Market in Eighteenth Century. *Modern Asian Studies*, 49(2), 336-364. <https://doi.org/10.1017/S0026749X13000449>
- Nikidehaghani, M., & Hui, F. (2017). Accounting and Accountability for Disability Benefits in Australia, 1909-1961.

- Accounting History*, 22(3), 348-369. <https://doi.org/10.1177/1032373216664369>
- Ohlson, J. A. (2015). Accounting Research and Common Sense. *Abacus*, 51(4), 525-535. <https://doi.org/10.1111/abac.12059>
- Parker, L. (2011). University Corporatisation: Driving Redefinition. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(4), 434-450. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.11.002>
- Parker, L. (2015). Accounting Historiography: Looking Back to the Future. *Meditari Accountancy Research*, 23(2), 142-157. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2015-0018>
- Patton, T. K., & Hutchison, P. D. (2013). Historical Development of The Financial Reporting Model for State and Local Governments in the United States from Late 1800s to 1999. *The Accounting Historians Journal*, 40(2), 21-53.
- Persson, M. E., & Napier, C. J. (2014). The Australian Accounting Academic in the 1950s: R.J. Chambers and Networks of Accounting Research. *Meditari Accountancy Research*, 22(1), 54-76. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2013-0020>
- Raden, A. Z. M., & Andrijanto, M. S. (2017). Hikayat Purasara: Komunikasi Visual Ilustrasi Wayang pada Naskah Sastra Betawi Abad ke-19. *Manuskripta*, 7(1), 141-168.
- Robertson, J., & Funnell, W. (2012). The Dutch East-India Company and Accounting for Social Capital at the Dawn of Modern Capitalism 1602-1623. *Accounting, Organizations and Society*, 37(5), 342-360. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.03.002>
- Rutherford, B. A. (2013). A Pragmatist Defence of Classical Financial Accounting Research. *Abacus*, 49(2), 197-218. <https://doi.org/10.1111/abac.12003>
- Samiolo, R. (2017). Accounting, Actorhood and Actors: A Comment on: Casting call: The Expanding Nature of Actorhood in U.S. Firms, 1960-2010 by Patricia Bromley and Amanda Sharkey. *Accounting, Organizations and Society*, 59, 21-26. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.06.003>
- Sanders, G. (2016). Religious Non-Places: Corporate Megachurches and Their Contributions to Consumer Capitalism. *Critical Sociology*, 42(1), 71-86. <https://doi.org/10.1177/0896920514531605>
- Sangster, A. (2012). Locating the Source of Pacioli's Bookkeeping Treatise. *The Accounting Historians Journal*, 39(2), 97-110. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.39.2.97>
- Sangster, A. (2016). The Genesis of Double Entry Bookkeeping. *The Accounting Review*, 91(1), 299-315. <https://doi.org/10.2308/accr-51115>
- Sian, S. (2011). Operationalising Closure in a Colonial Context: The Association of Accountants in East Africa, 1949-1963. *Accounting, Organizations and Society*, 36(6), 363-381. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.06.005>
- Sitorus, J. H. E., Triuwono, I., & Kamayanti, A. (2017). Homo Economicus vis a vis Homo Pancasila: A Fight against Positive Accounting Theory. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 25(S), 311-320.
- Steyaert, K. (2012). Batavia as Patria: Literary Representations of Batavia in W. J. Hofdijk's Work. *Dutch Crossing*, 36(3), 216-227. <https://doi.org/10.1179/0309656412Z.00000000016>
- Sumi, Y. (2017). The Use of Accounting Information for Factory Closure and Income Creation: The Case of the South Seas Development Company, 1937-1944. *Accounting History Review*, 27(2), 143-175. <https://doi.org/10.1080/21552851.2017.1323652>
- Suryadi. (2015). A Linguistic Kaleido scope of the Malay Letter; The Case of the Eighteenth Century Official Letters from the Sultanate of Buton. *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 16(2), 304-338. <http://dx.doi.org/10.17510/wacana.v16i2.380>
- Suswandari. (2017). Local History of Jakarta and Multicultural Attitude (Historical Local Study of Betawi Ethnic). *Journal of Education, Teaching and Learning*, 2(1), 34-41. <http://dx.doi.org/10.26737/jetl.v2i1.142>
- Suyono, S. J. (2001). *Tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, J. E. (2013). Railroad Investing and the Importance of Financial Accounting Information in 1880s America. *The Accounting Historians Journal*, 40(2), 55-89. <https://doi.org/10.1177/1032373216664369>

- org/10.2308/0148-4184.40.2.55
- Toms, J. S. (2010a). Calculating Profit: A Historical Perspective on the Development of Capitalism. *Accounting, Organizations and Society*, 35(2), 205-221. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.06.002>
- Toms, J. S. (2010b). The Labour Theory of Value, Risk and the Rate of Profit. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(1), 96-103. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2006.01.017>
- Triuwono, I. (2016). Taqwa: Deconstrucsting Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human's Divine Consciousness. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 24(S), 89-103.
- Walker, S. P. (2016). Revisiting the Roles of Accounting in Society. *Accounting, Organizations and Society*, 49, 41-50. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.11.007>
- Wibowo, P. H. (2015). "Si Jampang Jago Betawi". *Kajian Tokoh dalam Komik Ganes*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Yamey, B. S. (2012). Personal Accounts, Account Books and Their Probative Value: Historical Notes, C.1200 To C.1800. *The Accounting Historians Journal*, 39(2), 1-26. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.39.2.1>
- Zaid, O. A. (2004). Accounting Systems and Recording Procedures in the Early Islamic State. *Accounting Historians Journal*, 31(2), 149-170. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.31.2.149>